

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR PULAU DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**YUSNANDA
2017/17053105**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR PULAU DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019”**

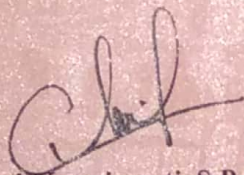
Nama : Yusnanda
BP/NIM : 2017/17053105
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Disetujui oleh :

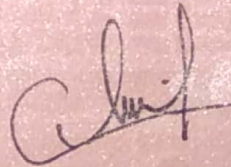
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Padang, Maret 2022

Pembimbing



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19820311 200501 2 005



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19820311 200501 2 005

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

"ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PULAU DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019"

Nama : Yusnanda

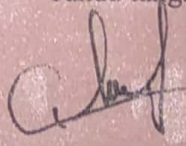
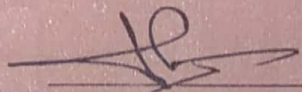
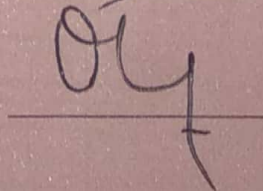
BP/NIM : 2017/17053105

Keahlian : Ekonomi Koperasi

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

No	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1	Ketua	Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd	
2	Anggota	Dr. Yulhendri, M.Si	
3	Anggota	Oknaryana, S.Pd, M. Pd. E	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusnanda
Nim/ Tahun Masuk : 17053105/2017
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Barulak/12 Juni 1998
Jurusan/Keahlian : Pendidikan Ekonomi/ Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi
Nomor Hp : 081378340998
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Pulau Di Indonesia
Tahun 2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2022
Yang menyatakan



Yusnanda
NIM.17053107

ABSTRAK

**Yusnanda (17053105) : Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan
Antar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-
2019**

Pembimbing : Tri Kurniawati, S.Pd., M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Williamson Indeks* antar pulau di Indonesia dan untuk mengetahui perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah 6 pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dan Maluku. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji beda ANOVA satu arah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain data PDRB dalam harga konstan dan data jumlah penduduk. Tergolong kepada jenis penelitian *library resesrch*, karena metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia berada pada tingkat sedang dengan rata-rata hasil Indeks Williamssonnya sebesar 0.350900. Berdasarkan pulau tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia, Pulau Jawa berada pada tingkatan tinggi, karena hasil dari Indeks Williamssonnya $> 0,5$. Sedangkan Pulau Sumatera berada pada tingkatan sedang, karena hasil dari perhitungan Indeks Williamssonnya $0,3 > IW < 0,5$. Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dan Pulau Papua dan Maluku berada pada tingkatan rendah karena hasil perhitungan Indeks Williamsson $< 0,3$. 2). Ketimpangan pembangunan ini terjadi oleh beberapa faktor yaitu letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jumlah penduduk yang berbeda.

Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019”***. Shalawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kendala yang dihadapi, sehingga penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan rendah hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki karya ilmiah ini sehingga menjadi lebih baik dalam penyusunan di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dan semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, proposal yang saya tulis ini jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Tri Kurniawati, S. Pd, M. Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Rani Sofya S. Pd, M. Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Yulhendri, M. Si dan Oknaryana S. Pd, M, Pd. E selaku tim penguji dosen penguji skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan berbagai masukan dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sudah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mendoakan penulis dan memberikan motivasi serta dukungan yang tidak terhingga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada semua anggota keluarga yang senantiasa memberikan doa, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan dari awal hingga saat ini, yang sering marah-marah apabila saya lalai (Ulfa, Deri, Fitri, Ayi, Dendhi, Aidil, Putri, Yuni, Wiki, dan Pad) yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa Patner yang selalu ada dalam keadaan apapun Rezi Yulia Pratiwi.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2017 yang sama-sama berjuang yang telah memberikan motivasi, semangat, saran serta dorongan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi pembacanya. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Padang, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan masalah	9
E. Tujuan penelitian	10
F. Manfaat penelitian	10
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Teori Pembangunan Ekonomi.....	11
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
3. Teori Ketimpangan Pembangunan.....	22
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	28
B. Penelitian Relevan	33
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Hipotesis	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Objek Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data	40

2. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Definisi Operasional	40
1. Pembangunan Ekonomi	41
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
3. Ketimpangan Pembangunan	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
1. Analisis Deskriptif	43
2. Uji Normalitas.....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
B. Pembahasan.....	59
BAB V	66
Kesimpulan dan Saran	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.5	
Tabel 2. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2015-2019.....	48
Tabel 3. Indeks Williamson Pulau Indonesia Tahun 2015-2019	49
Tabel 4. Uji Normalitas.....	52
Tabel 5. Anova Satu Arah.....	53
Tabel 6. Anova Satu Arah.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	38
Gambar 2. PDRB Harga Konstan Tahun 2015-2019.....	48
Gambar 3. Indeks Williamson Pulau Indonesia Tahun 2015-2019	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Harga Konstan Menurut Provinsi di Indonesia.....	73
Lampiran 2. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2015-2019.....	74
Lampiran 3. Indeks Williamson.....	76
Lampiran 4. Uji Normalitas	94
Lampiran 5. Anova Satu Arah	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di benua Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dan merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki beberapa pulau besar yang terdiri atas Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan beberapa pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1.916.906,77 km², sementara luas perairannya sebesar 3.110.000 km², yang didalamnya terdapat sebanyak 34 provinsi.

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak, seperti di Pulau Sumatera didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pulau Jawa didominasi oleh sektor industri yang tersebar diberbagai kota dipulau jawa. Pulau Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh sektor kerajinan yang diproduksi oleh masyarakatnya dan pariwisatanya. Pulau Kalimantan menjadi sektor pertambangan terbesar di indonesia dan disektor perkebunan. Pulau Sulawesi menjadi pulau penghasil sentra agraris penghasil kakao terbesar kedua dengan kualitas yang baik didunia. Sedangkan Pulau Papua didominasi oleh sektor industri seperti tambang emas dan Pulau Maluku menjadi sentra perikanan laut tangkap di

Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 ada sebanyak lebih kurang 1,3 miliar jiwa. Walaupun memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang banyak, Indonesia tidak terlepas dari isu ketimpangan pembangunan.

Menurut Bappenas (2018), berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia, meliputi : 1) Konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata. 2) Pelayanan dasar yang tidak merata. 3) Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) local dalam pembangunan yang tidak optimal, yang juga perbedaan karakteristik wilayah. 4) Tidak maksimalnya pembangunan wilayah dengan memanfaatkan kultur dan social budaya masyarakat. 5) Kebijakan afirmasi dan pendanaan pembangunan yang tidak merata. 6) Persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata.

Ketimpangan pembangunan merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah terdapat wilayah yang berkembang (*Development Region*) dan wilayah yang belum berkembang (*Underdevelopment Region*) (Sjafrizal, 2014).

Prinsip-prinsip yang mendasari ketimpangan pembangunan antar daerah diantaranya yaitu 1) Konsentrasi kegiatan ekonomi antarlokasi, 2) Penyamaan balas jasa faktor produksi antardaerah, 3) Hipotesis neoklasik (Sjafrizal, 2018). Jadi prinsip-prinsip diatas menjadi pembeda dari setiap ketimpangan pembangunan.

Menurut Sjafrizal (2014) Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Ketimpangan pembangunan sering menjadi permasalahan yang serius dan apabila tidak diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro akan merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Setiap daerah tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.

Apabila ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak diperbaiki maka akan memicu datangnya sebuah krisis yang lebih rumit seperti masalah kependudukan, sosial, struktur sosial, politik dan lingkungan serta

dapat merugikan proses dan hasil pembangunan yang akan dicapai suatu wilayah (Mopangga, 2014). Karakteristik setiap daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pada pembangunan masing-masing daerah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Ketidakteraturan pembangunan berakibat pada tingkat ketimpangan pada daerah tersebut (Syafriyazal, 2018).

Menurut Denny (2015), keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah. Dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat besar kecilnya laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tersebut. PDRB adalah total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam penduduk asli maupun penduduk asing (Todaro dan Smith, 2011).

PDRB menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, apabila PDRB suatu daerah tinggi maka akan tinggi pula tingkat kesejahteraan hidup dari masyarakat daerah tersebut, begitu juga sebaliknya apabila tingkat PDRB suatu daerah rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga rendah. Berikut ini adalah rata-rata PDRB dalam harga konstan menurut provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2015-2019.

Tabel 1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Aceh	122,666	116,374	121,241	126,824	132,087	123,838
2	Sumatera Utara	440,956	463,775	487,531	512,766	539,527	488,911
3	Sumatera Barat	140,719	148,134	155,984	164,034	172,321	156,238
4	Riau	448,992	458,769	470,984	482,158	495,846	471,350
5	Jambi	125,037	130,501	136,502	142,968	149,265	136,855
6	Sumatera Selatan	254,045	266,857	281,571	298,570	315,623	283,333
7	Bengkulu	38,066	40,077	42,074	44,171	46,362	42,150
8	Lampung	199,537	209,794	220,626	232,208	244,437	221,320
9	Kep. Bangka Belitung	45,962	47,848	49,985	52,215	53,951	49,992
10	Kep. Riau	155,131	162,853	166,082	173,684	182,184	167,987
Sumatera		1,971,111	2,044,982	2,132,580	2,229,598	2,331,603	2,141,975

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	DKI Jakarta	1,454,564	1,539,917	1,635,359	1,736,291	1,838,501	1,640,926
2	Jawa Barat	1,207,232	1,275,619	1,343,662	1,419,689	1,491,706	1,347,582
3	Jawa Tengah	806,765	849,099	893,750	941,164	992,106	896,577
4	DI Yogyakarta	83,474	87,686	92,300	98,024	104,490	93,195
5	Jawa Timur	1,331,376	1,405,564	1,482,300	1,563,769	1,650,143	1,486,630
6	Banten	368,377	387,835	410,137	434,015	458,023	411,677
Jawa		5,251,788	5,545,720	5,857,508	6,192,952	6,534,969	5,876,587

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bali	129,127	137,296	144,933	154,110	162,784	145,650
2	Nusa Tenggara Barat	89,338	94,524	94,608	90,391	94,015	92,575
3	Nusa Tenggara Timur	56,771	59,678	62,725	65,945	69,372	62,898
Bali dan Nusa Tenggara		275,236	291,498	302,266	310,446	326,171	301,123

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kalimantan Barat	112,347	118,183	124,289	130,589	137,121	124,506
2	Kalimantan Tengah	78,891	83,900	89,545	94,601	100,429	89,473
3	Kalimantan Selatan	110,863	115,744	121,859	128,093	133,318	121,975
4	Kalimantan Timur	440,676	439,004	452,742	464,823	486,977	456,844
5	Kalimantan Utara	49,316	51,065	54,537	57,837	61,835	54,918
Kalimantan		792,093	807,896	842,972	875,943	919,680	847,717

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sulawesi Utara	70,425	74,765	79,484	84,259	89,028	79,592
2	Sulawesi Tengah	82,787	91,015	97,475	103,593	111,003	97,175
3	Sulawesi Selatan	250,803	269,401	288,814	309,202	330,605	289,765
4	Sulawesi Tenggara	72,993	77,746	83,002	88,329	94,078	83,230
5	Gorontalo	22,069	23,507	25,090	26,721	28,433	25,164
5	Sulawesi Barat	25,964	27,525	29,282	31,111	32,874	29,351
Sulawesi		525,041	563,959	603,147	643,215	686,021	604,277

No.	PROVINSI	PDRB HARGA KONSTAN (dalam juta rupiah)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Maluku	24,859	26,284	27,814	29,467	31,109	27,907
2	Maluku Utara	20,380	21,557	23,211	25,050	26,586	23,357
3	Papua Barat	52,346	54,711	56,908	60,464	62,071	57,300
4	Papua	130,312	142,225	148,818	159,790	134,678	143,165
Papua dan Maluku		227,897	244,777	256,751	274,771	254,444	251,728

(Sumber : BPS 2021)

Dapat dilihat dari Tabel 1, data PDRB antar pulau di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, hanya di Pulau Papua dan Maluku yang mengalami penurunan pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Pulau Jawa memiliki rata-rata PDRB tertinggi jika dibandingkan dengan pulau lainnya sebesar 5,8 triliun rupiah diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 2,1 triliun rupiah, selanjutnya ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dengan rata-rata PDRB 847 miliar rupiah

dan 604 miliar rupiah, selanjutnya ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 301 miliar rupiah, diurutan terakhir ada Pulau Papua dan Maluku sebesar 251 miliar rupiah.

Perbedaan tersebut menunjukkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia, karena PDRB dalam harga konstan memiliki fungsi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi penduduk suatu daerah (BPS,2020). Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah untuk menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Menurut Sjafrizal (2014), penyebab terjadinya sebuah ketimpangan pada awalnya disebabkan karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang berda di daerah tersebut. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah terdapat wilayah berkembang (*develoved region*) dan wilayah belum berkembang (*underdeveloped region*). Perbedaan ini juga dapat menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda- beda, sehingga

menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno,2006). Dapat disimpulkan dari data diatas adanya perbedaan rata-rata PDRB antar pulau di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan pembangunan.

Secara harfiah, pembangunan bertujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, namun dalam kenyataan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh penduduk diwilayah Sumatera secara merata. Ketimpangan pembangunan diwilayah Sumatera selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Kita lihat saja adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terjadi didaerah di pesisir pantai Pulau Sumatera.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi dimasing-masing pulau di Indonesia akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat dan tingkat pemerataan pendapatan masing-masing wilayah. Dengan adanya masalah ketimpangan pembangunan diwilayah tersebut yaitu, dilihat dari adanya perbedaan antara tingkat PDRB dan Jumlah Penduduk serta perbedaan potensi di masing-masing pulau yang berada di Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah ini diperlukan agar penelitian yang dilaksanakan memiliki ruang lingkup yang jelas terdapat masalah yang diidentifikasi, yaitu :

1. Pembangunan menyebabkan timbulnya ketimpangan wilayah di Indonesia.
2. Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai PDRB dalam harga konstan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2019. Sehingga diduga adanya ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Objek penelitian adalah 6 pulau di Indonesia pada tahun periode 2015-2019.
2. Penelitian ini tentang perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di pulau-pulau di Indonesia pada periode tahun 2015-2019.

D. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar Indeks Williamson 6 pulau di Indonesia pada tahun 2015-2019?
2. Apakah terdapat perbedaan ketimpangan antar 6 pulau di Indonesia pada tahun 2015-2019?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Indeks Williamson antar pulau yang berada di Indonesia pada periode tahun 2015-2019.
2. Ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, ekonomi pembangunan, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ekonomi sumber daya manusia.
2. Berguna bagi pengambil kebijakan pemerintah, dan badan pusat statistik.
3. Berguna bagi peneliti untuk meneliti tentang perbedaan analisis ketimpangan pembangunan di pulau-pulau di Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Sebagai bahan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Jadi dapat dikatakan selama periode tahun 2015 sampai 2019 tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia berada pada tingkat sedang karena rata-rata hasil Indeks Williamsonnya sebesar 0.350900. Sedangkan kalau berdasarkan pulau tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia, Pulau Jawa berada pada tingkatan tinggi, karena hasil dari Indeks Williamsonnya $> 0,5$. Sedangkan Pulau Sumatera berada pada tingkatan sedang, karena hasil dari perhitungan Indeks Williamsonnya $0,3 > IW < 0,5$. Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dan Pulau Papua dan Maluku berada pada tingkatan rendah karena hasil perhitungan Indeks Williamson $< 0,3$.
2. Ketimpangan pembangunan ini adalah permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah. Ketimpangan pembangunan ini terjadi oleh beberapa faktor yaitu letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jumlah penduduk yang berbeda. Hal ini menjadi pemicu ketidakmerataan terjadinya ketimpangan ekonomi di suatu daerah, oleh sebab itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatasi

permasalahan ketimpangan ekonomi di berbagai daerah agar tidak terjadi lagi ketidakmerataan ketimpangan pembangunan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan di pulau Indonesia diberbagai sektor, terutamanya pada sektor ekomi seperti meningkatkan kualitas sumber daya alam manuasia maupun alam disetiap pulau di Indonesia, meningkatkan berbagai insfrastruktur di setiap pulau di Indonesia. Agar bisa memberatakan ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap pulau di Indonesia dan selalu mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan di pulau di Indonesia.
2. Bagi peneti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan ketimpangan pembangunan di pulau Indonesia dengan menggunakan objek penelitian yang lebih besar lagi dan menggunakan periode terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- adisasma, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah : Dinamika Dan Strategi Pembangunan*. Malang: Ub Press.
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal* , 2, 4.
- Cintha, N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Kalimantan. *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1).
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Denny, I. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Yayasan Al-Kahfi* , 4.1.
- Dewi, U., & Ida, A. I. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(2), 1-17.
- Etik, U. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika* , 9, 42-50.
- Fitri, M. R. (2009). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Kajian* , 20, 45-58.
- Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 44563.